
**AGENDA SETTING DALAM PROSES KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DESA KOTA KAPUR SEBAGAI DESTINASI WISATA SEJARAH****Desi Sapitri**Universitas Bangka Belitung
E-mail: desisapitri250613@gmail.com

Diterima:

22 Januari 2021

Direvisi:

27 Januari 2021

Disetujui:

Abstrak

Desa Kota Kapur merupakan salah satu tempat di Kabupaten Bangka yang memiliki peninggalan sejarah berupa situs yang disebut dengan Situs Kota Kapur. Kondisi wilayah Situs Kota Kapur terlihat masih hanya seperti hutan dan perkebunan masyarakat sehingga membuat kontrol pemerintah dalam melakukan perencanaan pengembangan sangat sulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan agenda setting dalam proses kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah serta tantangan yang ditemui dan solusi dalam menanggulangi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori agenda setting milik John W. Kingdon yang menggunakan tiga aliran yaitu, aliran masalah, aliran politik dan aliran kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses agenda setting kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah belum menuai kepastian dengan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci : Agenda Setting, Pengembangan, Wisata Sejarah**Abstract**

Kota Kapur Village is one of the regions in Bangka Regency that has a historical heritage in the form of a site namely Kota Kapur Archeological Site. The condition of Kota Kapur Archeological Site still looks like a forest and community plantation, thus causing the control of government in planning a development very difficult. Therefore, this study aims to describe the agenda-setting in the process of creating the development policy of Kota Kapur village as a historical tourist destination as well as the challenge encountered along with the solutions to overcome them. This research uses the agenda-setting theory proposed by John W. Kingdon with three streams – problems, politics, and policies. Meanwhile, the method in this study was qualitative descriptive. As a result, this research shows that the process of agenda-setting for the development policy of Kota Kapur village as a historical tourist destination has not yielded any certainty due to the different points of view among the provincial government, regency government, village government, and the community.

Keywords : Agenda-Setting, Development, Historical Tourism

PENDAHULUAN

Pengembangan destinasi wisata merupakan wujud utama dalam memajukan daerah yang memiliki banyak potensi alam maupun buatan manusia (Ajeng, 2020). Berbagai destinasi wisata yang sudah banyak dikenali sampai saat ini dan masih banyak juga yang belum terealisasi semestinya, salah satunya adalah situs Kota Kapur yang berada di Desa Kota Kapur. Situs kota kapur adalah lokasi sumber sejarah keberadaan kerajaan Sriwijaya yang banyak sekali ditemukan berbagai macam tinggalan kerajaan sriwijaya salah satunya adalah Prasasti Kota Kapur.

Adapun dalam hal ini situs Kota Kapur menjadi perhatian bagi banyak pihak karena dari tahun ke tahun hanya berisi wacana saja terkait pengembangan ini. Dalam hal ini memunculkan suatu penyusunan agenda sebagai acuan tercapainya pengembangan situs Kota Kapur menjadi suatu destinasi wisata berbasis sejarah. Agenda Setting adalah sebuah langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan. Dengan adanya agenda setting ini nantinya dapat terlihat pentingnya kebijakan mengenai pengembangan situs Kota Kapur bagi Desa Kota Kapur.

Artinya perlu adanya inisiasi dari institusi yang terkait dengan pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berupa kebijakan atau program yang menjadikan Situs Kota Kapur sebagai destinasi wisata berbasis sejarah yang ada di Desa Kota Kapur.

Dalam rencana pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah diajukan dengan banyaknya tantangan salah satunya adalah mengenai sengketa lahan tempat ditemukannya Prasasti Kota Kapur. Separuh kawasan Situs Kota Kapur terdapat pada lahan pribadi masyarakat Desa Kota Kapur yang sampai saat ini belum dapat menemukan kepastian terkait lahan tersebut. Permasalahan ini memunculkan seharusnya dan senyatanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus tepat sasaran dan transparan agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Penelitian ini akan fokus pada kajian mengenai bagaimana proses agenda setting dalam kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah, yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses agenda setting pada kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah. Penelitian ini juga berkaitan dengan tantangan dan solusi yang terkait dengan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan. Pertama, penelitian ini dilakukan oleh (Choirunisa, 2018) yang berjudul “Analisis Agenda Setting Dalam Proses Perumusan Program Desa Layak Anak (Studi di Desa Panggungrejo, Kabupaten Pringsewu)”. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh (Apriza, 2018) yang berjudul “Formulasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus”. Ketiga, Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Asriandy, 2016) yang berjudul “Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng”. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah peneliti akan mengkaji mengenai agenda setting dalam proses kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018), dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka mengingat Situs Kota Kapur berada tepat diujung Desa Kota Kapur.

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Maharani & Bernard, 2018). Adapun sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa kriteria yang sudah ditentukan peneliti. Informan yang memiliki kriteria sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Babel dan Kabupaten Bangka, Pemerintah Desa Kota Kapur, serta masyarakat Desa Kota Kapur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder (Pratiwi, 2015). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari wawancara yang tidak terstruktur dengan memiliki pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemerintah yang terkait dalam pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dll yang berkaitan dengan agenda setting.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) terbagi tiga yaitu: pertama, reduksi data adalah proses memilih dan menyederhanakan data mentah yaitu data wawancara dengan pihak terkait pengembangan situs Kota Kapur (Rijali, 2019), seluruh data yang didapatkan kemudian dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menampilkan data yang sistematis yang sudah diolah dalam bentuk tabel, grafik, matriks, chart yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu tahap pengambilan keputusan atas pertanyaan peneliti yaitu mengenai bagaimana proses agenda setting dalam kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah, serta kendala dan solusi yang ditemukan dalam pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Agenda Setting Pengembangan Situs Kota Kapur

a) Aliran Masalah Rencana Kebijakan Pengembangan Situs Kota Kapur

Dalam melihat tolak ukur masalah maka persoalan yang muncul adalah ketika isu mengenai pembentukan kawasan cagar budaya di Kabupaten Bangka salah satunya adalah Situs Kota Kapur. Dalam hal ini Situs Kota Kapur menjadi objek yang sangat kuat untuk menjadi destinasi wisata berbasis sejarah di Desa Kota Kapur dengan banyaknya temuan benda-benda bersejarah dari kerajaan terkenal yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ada delapan benda tinggalan bersejarah dari Kerajaan Sriwijaya yang dianjurkan dalam penetapan cagar budaya tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Situs Kota Kapur, Prasasti Kota Kapur II, Candi Kota Kapur I, Candi Kota Kapur II, Candi Kota Kapur III, Benteng Kota Kapur, Dermaga Kuno, dan Lapik Prasasti Kota Kapur.

Desi Sapitri

Mengenai Pengembangan pada Situs Kota Kapur ini sendiri sebenarnya sudah lama sekali diupayakan, karena Situs Kota Kapur memiliki potensi yang sangat besar dengan beberapa temuan berupa candi, prasasti, keramik, emas, logam dan juga benteng yang mengelilingi situs tersebut. Namun dari tahun ke tahun pengembangan tersebut belum berjalan sesuai dengan semestinya. Situs Kota Kapur masih terlihat seperti hutan belantara, karena belum ada pembangunan apapun dalam lokasi situs tersebut. Lokasi Situs Kota Kapur itu berdiri di atas lahan masyarakat yang menjadikan salah satu kendala dalam melakukan pengembangan pada Situs Kota Kapur.

b) Aliran Politik Peran Pemangku Kebijakan

Pemerintah Provinsi memiliki peran yang kuat terkait Situs Kota Kapur, terbukti bahwa Situs Kota Kapur masuk pada PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025.

Pemerintah Kabupaten adalah sebagai unsur pendukung yang melaksanakan aturan dari rencana induk Pemerintah Provinsi untuk diteruskan kepada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata yaitu salah satunya ada Cagar Budaya Situs Kota Kapur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka yang mengeluarkan anggaran terkait pembebasan lahan kawasan Situs Kota Kapur melalui sumber dana APBD Kabupaten Bangka. Peran Pemerintah Kabupaten mengusulkan anggaran yang akan di keluarkan terkait rencana pengembangan Situs Kota Kapur terutama untuk pembebasan lahan.

Pemerintah Desa sebagai fasilitator penghubung masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten. Mengingat adanya Cagar Budaya yang penting berada di Desa Kota Kapur akan menjadikan peluang yang besar bagi Pemerintah Desa untuk memajukan Desa Kota Kapur dengan mengusulkan program-program tentang Situs Kota Kapur.

Dalam pengembangan dan pemeliharaan Situs Kota Kapur ada peranan masyarakat yang sangat kuat dan peduli akan cagar budaya yang ada di daerah mereka yaitu masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata Desa Kota Kapur.

Dalam mewujudkan Situs Kota Kapur menjadi destinasi wisata sejarah sangatlah tidak mudah, butuh peran serta Pemerintah Kabupaten dan dinas terkait dalam mengatasi satu persatu permasalahan yang menjadi kendala dari pembangunan situs tersebut.

Tidak hanya peran pemerintah, namun peran masyarakat yang peduli dengan wisata yang ada di Desa Kota Kapur juga sangat memberikan pengaruh kuat.

Adapun rencana mengenai pembangunan awal dalam Situs Kota Kapur yaitu:

- Pembuatan jalan setapak menelusuri sekeliling situs
- Penanaman pohon disebelah jalan setapak
- Pembuatan beton blok jalan
- Penyewaan sepeda untuk berkeliling situs
- Pembangunan replika candi-candi
- Pembangunan fasilitas umum seperti wc, museum, dll

c) Aliran Kebijakan/Alternatif Solusi Kebijakan

Mengenal dan mendefinisikan masalah yang muncul menjadi pertanyaan di masyarakat terkait dengan rencana pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah sangat ditunggu oleh masyarakat Desa Kota Kapur. Kepastian dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan situs Kota Kapur sudah menjadi faktor krusial dalam

proses pembuatan kebijakan publik. Setelah masalah publik didefinisikan dengan baik oleh pembuat Kebijakan, kemudian menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan dengan mencari alternatif-alternatif kebijakan.

Adapun alternatif-alternatif solusi yang muncul baik berasal dari sumber pemerintah atau non pemerintah. Alternatif kebijakan yang bersumber dari pemerintah adalah mengeluarkan surat pembebasan lahan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan alternatif dari non pemerintah yaitu POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Kota Kapur selaku perwakilan dari masyarakat memberikan alternatif solusi untuk memberikan peluang diskusi antara masyarakat dan pemerintah daerah perihal pembebasan lahan dan melakukan promosi yang semakin besar terkait Situs Kota Kapur yang layak untuk dijadikan destinasi wisata berbasis sejarah.

Dalam melakukan pengembangan pada suatu situs sejarah memang tidak mudah, namun kerja keras para pemerintah terkait hal ini belum terlalu memadai. Dapat dilihat pada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih belum menyatu, bahkan jarang untuk berdiskusi dalam satu meja terkait pengembangan Situs Kota Kapur .

B. Tantangan Rencana Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur sebagai Destinasi Wisata Sejarah

Dalam pembahasan ini adalah tahap mengidentifikasi tantangan yang ditemui terkait pengembangan situs sejarah yang ada di Desa Kota Kapur. Adapun tantangan pra kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah yaitu:

- a) Lemahnya partisipasi Pemerintah Desa dalam melakukan pembebasan lahan yang masih menjadi kepemilikan pribadi

Lahan diatas berdirinya situs Kota Kapur masih menjadi lahan milik pribadi. Terkait pembebasan lahan masyarakat tidak mempersulit pemerintah untuk memberikan lahan tersebut sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, namun pemerintah tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk berunding dalam satu meja membahas pembebasan lahan tersebut. Dalam artian dengan melemahnya partisipasi Pemerintah Desa menjadikan rencana pengembangan ini tidak akan berkembang dengan cepat namun akan tetap berdiri ditempat sesuai dengan tingkat partisipasinya.

- b) Musyawarah dalam pengembangan situs Kota Kapur terkesan ceremonial dan sekedar sebatas wacana

Adanya rapat pertemuan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintah terkait dengan Pengembangan Situs Kota Kapur hanya membahas perihal kondisi situs tersebut, namun belum memberikan keputusan yang pasti apakah pengembangan situs Kota Kapur akan ditetapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini yang menjadikan setiap adanya pembahasan pengembangan situs Kota Kapur hanya sebatas wacana, karena belum ada gerakan yang pasti atau keputusan secara yuridis dalam menguatkan rencana pengembangan tersebut.

- c) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bangka, Pemerintah Desa dan LSM Desa Kota Kapur belum berjalan baik

Komunikasi yang belum berjalan baik, masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan kelompok sadar wisata Desa Kota Kapur.

- d) Belum adanya keputusan kebijakan yang pasti terkait pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah

Desi Sapitri

Pemerintah Desa masih bingung dengan keputusan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait Kebijakan Pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah karena belum memberikan kejelasan pasti.

- e) Serta penanganannya dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa belum terintegrasi dan masih sektoral

Dalam hal ini perlu adanya pengesahan untuk melakukan suatu pengembangan. Dengan dikeluarkannya surat rekomendasi berskala kabuapten menjadi gerakan awal secara tertulis yang membuktikan bahwa adanya dasar hukum yang kuat, namun belum berjalan baik hingga skala provinsi. Hal ini yang menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan tinggalkan benda-benda bersejarah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat jika dijadikan suatu destinasi wisata berbasis sejarah.

KESIMPULAN

Agenda setting adalah tahap awal untuk melihat rencana kebijakan pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah (Dearing *et al.*,1996). Dalam menentukan penyusunan agenda kebijakan melalui tahapan-tahapan yang mengalir sehingga menemukan alternatif-alternatif solusi kebijakan dalam suatu permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses agenda setting dalam rencana kebijakan pengembangan Situs Kota Kapur dapat dijelaskan melalui tiga aliran penyusunan agenda yaitu pertama aliran masalah, pada aliran masalah menemukan identifikasi masalah utama yaitu mengenai isu pembentukan kawasan cagar budaya yaitu Situs Kota Kapur. Selanjutnya Situs Kota Kapur di masalahkan dengan status lahan yang menjadi milik pribadi masyarakat, sehingga ingin melakukan pembanguna baik di dalam maupun di luar kawasan situs tersebut tidak dapat dilakukan, karena masalah pembebasan lahan belum terselesaikan dengan semestinya.

Kedua aliran politik, dalam aliran politik adalah melihat peran dan persepsi setiap masing-masing aktor, baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah Provinsi memiliki peran yang kuat yaitu Situs Kota Kapur masuk Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang rencana induk pembangunan Kepariwisataaan. Pemerintah Kabupaten sebagai unsur pendukung, sedangkan Pemerintah Desa sebagai fasilitator atau penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Adapun peran masyarakat sangat kuat yang tergabung dalam LSM Desa Kota Kapur yaitu POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), LSM Desa Kota Kapur sangat menginginkan pengembangan pada Situs tersebut agar menjadikan Desa Kota Kapur dikenal sebagai tempat destinasi wisata berbasis sejarah melalui cagar budaya Situs Kota Kapur.

Ketiga aliran kebijakan, dalam aliran ini di tentukan prioritas yang akan di lakukan pengembangan pada Situs Kota Kapur yaitu: Benteng Kota Kapur, Candi I-III Kota Kapur, Dermaga Kuno Kota Kapur, Lapik Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kota Kapur II, Situs Kota Kapur. Selanjutnya alternatif solusi pemecahan masalah yang bersumber dari pemerintahan

adalah menetapkan anggaran sesuai peraturan agar tidak merugikan masyarakat yang tertera pada UU No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan alternatif solusi dari luar pemerintahan yaitu LSM Desa Kota Kapur mengusulkan untuk memberikan peluang diskusi antara masyarakat dan pemerintah daerah secara terbuka dan melakukan promosi yang semakin besar terkait Situs Kota Kapur.

Tantangan dalam pengembangan Desa Kota Kapur sebagai destinasi wisata sejarah terdapat beberapa hal yaitu lemahnya partisipasi Pemerintah Desa Kota Kapur, musyawarah rencana pengembangan Situs Kota Kapur terkesan ceremonial dan sekedar sebatas wacana, koordinasi belum berjalan baik antara LSM dan Pemerintah Daerah, Persepsi tentang pengembangan Situs Kota Kapur masih berbeda dari berbagai pihak, penanganan pun belum terintegrasi dan masih sektoral.

Berdasarkan penjelasan proses agenda setting dan tantangan pengembangan Situs Kota Kapur menunjukkan bahwa penyusunan agenda yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan semestinya, karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa terkait tidak adanya anggaran yang turun langsung untuk Situs Kota Kapur, dan kemauan politik dari beberapa pihak tersebut lemah dalam artian kepedulian tentang Situs Kota Kapur sedikit.

BIBLIOGRAFI

- Ajeng Aldila Febryandi, Raden. (2020). Manajemen strategi dalam pengembangan obyek wisata Bukit Kapur Jeddih Madura (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan). *Publika*, 8(2).
- Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Apriza, Tiyas. (2018). *Formulasi kebijakan pengembangan objek wisata air terjun Lembah Pelangi Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Asriandy, Ian. (2016). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng. Universitas Hasanuddin.
- Choirunisa, Nabila. (2018). *Analisis Agenda Setting dalam proses perumusan program desa layak anak (Studi di Desa Panggungrejo, Kabupaten Pringsewu)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Dearing, James W., Rogers, Everett M., & Rogers, Everett. (1996). *Agenda-setting* (Vol. 6). Sage.
- Maharani, Sri, & Bernard, Martin. (2018). Analisis hubungan resiliensi matematik terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 1(5), 819–826.
- Pratiwi, Riska. (2015). Perbandingan Potensi Berat dan Volume Lumpur yang Dihasilkan oleh IPA Badak Singa PDAM Tirtawening Kota Bandung Menggunakan Data Sekunder dan Primer. *Jurnal Reka Lingkungan*, 3(1), 30–40.
- Rijali, Ahmad. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sugiyono. (2018). *Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)